

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PKH DAN BLT DI DESA ANAKOLI, KECAMATAN WOLOWAE, KABUPATEN NAGEKEO

Melkor Palu Rani¹, Yohana Fransiska Medho²
ekkyrani06@gmail.com¹, yohanamedho@gmail.com²
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Anakoli merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH dan BLT telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan mekanisme pengawasan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan agar tujuan dari program sosial ini dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PKH, BLT, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Anakoli.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) and Direct Cash Assistance (BLT) policies in Anakoli Village, Wolowae District, Nagekeo Regency, as a governmental effort to improve community welfare. Anakoli Village is one of the underdeveloped villages with a high poverty rate, where most residents work as farmers and fishermen. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving village officials, community leaders, and program beneficiaries. The findings indicate that the implementation of PKH and BLT policies has positively contributed to improving the quality of life of the villagers, especially in meeting basic needs and accessing health and education services. However, several challenges remain, such as limited budget, lack of transparency, and low community participation in the implementation process. This study recommends strengthening the capacity of village officials, improving monitoring mechanisms, and increasing community involvement at every stage of policy implementation to ensure the effectiveness and sustainability of these social programs.

Keywords: Policy Implementation, PKH, BLT, Community Welfare, Anakoli Village.

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan,

yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus dari negara dan birokrasi mengingat peran penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan karena berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga jika pembangunan di setiap desa berjalan dengan baik, pembangunan yang merata dapat segera tercapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri dari tahap perencanaan hingga pengawasan dengan melibatkan stakeholders desa, seperti BPD dan organisasi masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat berperan dalam memperbaiki kualitas hidup warga. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mendorong tercapainya tujuan tersebut, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal.

Terdapat sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Wasistiono (2001) mengemukakan ada tiga peran penting pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan. Peran pelayanan umum, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya. Peran pembangunan, yaitu peran pemerintah melaksanakan program-program pembangunan di desa baik yang program yang datang dari pemerintah maupun program pemerintah desa itu sendiri. Peran perlindungan masyarakat, yaitu peran pemerintah menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah

Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat; bahwa pengentasan kemiskinan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan pembangunan millenium; bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan pelaksanaan kemiskinan.

Menurut Bappenas (2005), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup .
2. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan .
3. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Gambar 1 Diagram Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nagekeo



(Sumber: BPS)

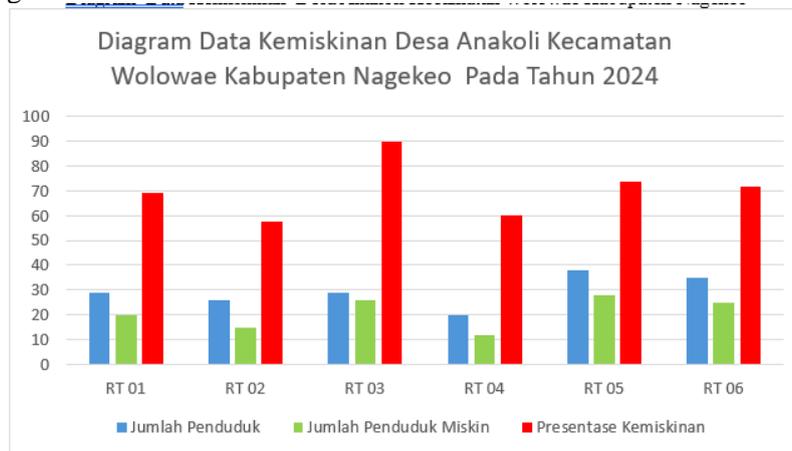
BPS mengartikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan yaitu sebesar Rp 472,04) atau sebesar Rp 2,36 juta untuk rumah tangga dengan lima anggota keluarga. Sementara itu, e-book ‘Nagekeo dalam Angka 2024’ menyebutkan, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Nagekeo adalah Rp 823.489 pada tahun 2023, naik dari Rp 709.168 pada tahun 2022, atau hampir dua kali lipat dari rata-rata pengeluaran per kapita untuk penduduk di bawah garis kemiskinan. Dari Rp 833.489 itu, sebesar 55,03 persen atau Rp 453.202 dipakai untuk memenuhi kebutuhan makanan, seperti membeli padi-padian (13,81 persen), rokok (7,38 persen) dan makanan dan minuman jadi (7,65 persen).

Sisanya, Rp 380.270 atau 54,07 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-makanan di antaranya 27,23 persen untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, 9,08

persen untuk aneka barang dan jasa, dan 2,96 persen untuk pajak, penguatan dan asuransi. Pengeluaran 58,66 persen penduduk antara Rp 500.000 – Rp999.999. Menurut golongan pengeluaran per kapita dalam sebulan, BPS mengelompokkan penduduk Nagekeo tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 500 ribu, sebanyak 51.644 jiwa atau 31,1 persen dari total penduduk 166.060 jiwa. Kedua, kelompok penduduk dengan pengeluaran antara Rp 500 ribu hingga Rp999.99 per kapita per bulan, jumlahnya 97.411 jiwa atau 58,66 persen.

Pembangunan di tingkat desa merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu desa yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya adalah Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Tim

Gambar 2 Diagram Data Kemiskinan Desa Anakoli Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo



(Sumber : Desa Anakoli)

Desa Anakoli merupakan desa tertinggal yang sementara berproses berkembang di Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk Desa Anakoli 822 jiwa dengan memiliki berbagai macam latar belakang pekerjaan sebagai petani, ASN, dan nelayan namun yang paling banyak cenderung berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data tingkat kemiskinan desa mencapai sekitar 71,2%, yang dapat dikategorikan sebagai tinggi bahkan sangat tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional maupun kabupaten dan nelayan dengan penghasilan yang rendah sehingga banyak masyarakat yang masih tergolong miskin. Berdasarkan data tahun 2024 masyarakat yang menerima bantuan BLT berjumlah 27 jiwa sedangkan yang menerima bantuan PKH 54 jiwa .

Desa Anakoli, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada. Masyarakat Desa Anakoli sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada kondisi alam. Terlepas dari keberagaman potensi yang ada, desa ini masih menghadapi masalah ketimpangan sosial-ekonomi, terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya infrastruktur yang memadai.

Pemerintah desa melalui kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kondisi tersebut. Kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, diharapkan dapat

mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Anakoli. Selain itu, kebijakan yang menyentuh sektor ekonomi lokal, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor pertanian dan perikanan, menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan dan hambatan seringkali muncul, baik dari faktor internal seperti kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, maupun dari faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran dan dukungan dari pihak luar. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah desa mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan apa saja langkah-langkah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PKH DAN BLT DI DESA ANAKOLI, KECAMATAN WOLOWAE, KABUPATEN NAGEKEO.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan holistik, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek yang diteliti melalui pengumpulan data langsung di lapangan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa anakoli melalui observasi langsung dan wawancara dengan para informan yang relevan. Arikunto (2013) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang bersifat dinamis serta kontekstual sesuai dengan realitas yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program PKH DAN BLT Di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, yang dianalisis menggunakan 2 aspek, yaitu :

- 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemeberian uang tunai atau beragam bantuan
- 2) Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan

A. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dari krisis atau kondisi

darurat tertentu, serta untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. BLT adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya keluarga atau individu dengan tingkat penghasilan rendah.

Program BLT tidak hanya berfungsi sebagai bantuan keuangan langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk dukungan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penerima. Di antaranya adalah bantuan untuk kebutuhan sekolah anak-anak, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan makanan sehari-hari, serta untuk mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga lainnya, seperti kebutuhan kesehatan, pembelian alat tulis sekolah, pakaian layak pakai, serta kebutuhan lainnya yang menunjang kelangsungan hidup yang layak bagi keluarga penerima manfaat.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi, seperti naiknya harga kebutuhan pokok atau dampak dari bencana. Dalam pelaksanaannya, BLT diharapkan dapat membantu penerima manfaat dalam:

- 1) Menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap stabil.
- 2) Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak melalui bantuan biaya sekolah.
- 3) Memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan nutrisi keluarga.
- 4) Menyediakan jaminan sosial sementara hingga kondisi ekonomi keluarga membaik.

Dengan demikian, BLT tidak hanya menjadi bentuk intervensi jangka pendek, tetapi juga dapat berperan sebagai jaring pengaman sosial untuk mencegah terjadinya kemiskinan yang lebih dalam. Program ini menjadi salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang sulit. berupa indikator Mendorong Pemuliahan Ekonomi dan Transparansi.

1. Mendorong Pemulihan Ekonomi

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, telah membuktikan perannya yang strategis dalam menggerakkan pemulihan ekonomi setelah masa pandemi. BLT tidak sekadar memberikan bantuan finansial kepada keluarga-keluarga penerima, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga. Dengan bantuan ini, masyarakat dapat lebih leluasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

Selain itu, BLT juga berperan penting dalam meningkatkan perputaran uang di dalam desa. Dana yang diterima oleh penerima BLT tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk memperkuat usaha mikro dan menopang kegiatan ekonomi lokal lainnya. Hal ini menciptakan efek positif yang lebih luas, memperkuat pasar lokal dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

BLT juga berfungsi sebagai stimulan ekonomi produktif dengan mendorong semangat kemandirian ekonomi. Bantuan ini memberikan modal awal bagi para penerima untuk mengembangkan usaha kecil atau menambah kapasitas produksi mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga produsen aktif

yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Sinergi antara BLT dengan pendampingan kelembagaan lokal seperti kelompok tani, koperasi, atau lembaga ekonomi lainnya, memiliki potensi besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi desa secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, penerima BLT dapat dibantu dalam mengelola dana dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari bantuan yang diterima. Dengan demikian, BLT tidak hanya memberikan bantuan sebentar, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Anakoli.

Wawancara dengan Bapak Yoseph Laka Rani selaku Kepala Desa Anakoli:

BLT-Dana Desa berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi lokal. Dengan nilai bantuan Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya bagi 28 keluarga miskin di Desa Anakoli, ini tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa. Dana bantuan ini dapat digunakan sebagai modal usaha kecil atau untuk mempertahankan usaha yang sudah ada, seperti yang dilakukan oleh Kelompok Tani Milenial Suka Maju Desa Anakoli dalam pengembangan hortikultura. Kolaborasi mereka dengan Bank NTT Cabang Mbay telah berhasil memperkuat produksi tanaman sayur, cabai, tomat, dan berbagai buah, yang sesuai dengan tujuan nasional untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Yoseph Laka Rani selaku Kepala Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa BLT-Dana Desa memainkan peran strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi lokal, khususnya bagi keluarga miskin yang terdampak kondisi ekonomi pasca pandemi. Di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, sebanyak 28 keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan pertama, dan Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya. Bantuan ini tidak hanya meningkatkan daya beli warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga turut mendorong perputaran uang di dalam desa. Warung sembako, pedagang sayur keliling, dan pelaku usaha kecil lainnya turut merasakan dampak positif dari peningkatan konsumsi rumah tangga penerima bantuan.

Lebih dari sekadar konsumsi, BLT-Dana Desa juga berfungsi sebagai stimulan ekonomi produktif. Beberapa penerima memanfaatkan dana tersebut untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha mikro, termasuk dalam bidang pertanian. Salah satu contoh nyata adalah Kelompok Tani Milenial Suka Maju yang berhasil mengembangkan usaha hortikultura di Desa Anakoli. Dengan memanfaatkan dana BLT sebagai tambahan modal, mereka meningkatkan hasil produksi sayuran seperti cabai, tomat, dan terong. Kegiatan ini tidak hanya membuka lapangan kerja bagi pemuda desa, tetapi juga membangun semangat kemandirian ekonomi lokal.

Keberhasilan kelompok tani ini tidak lepas dari kolaborasi dengan Bank NTT Cabang Mbay yang memberikan pendampingan serta akses pembiayaan yang terukur. Sinergi antara bantuan sosial BLT-Dana Desa dan pendampingan kelembagaan inilah

yang menjadi kekuatan dalam mempercepat pemulihan ekonomi desa. Selain mendorong swasembada pangan di tingkat lokal, model seperti ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Wawancara dengan Bapak Bertolemus Seso selaku Ketua BPD Desa Anakoli :

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi 28 penerima di Desa Anakoli sangat membantu dalam meningkatkan stabilisasi pendapatan rumah tangga, terutama pasca pandemi COVID-19. BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga miskin yang terdampak krisis, sekaligus membantu menekan angka kemiskinan sementara hingga situasi ekonomi membaik. Selain itu, bantuan ini juga memungkinkan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan di tengah tekanan ekonomi. Adanya multiplier effect, di mana uang yang disalurkan melalui BLT beredar kembali di Desa Anakoli sehingga menciptakan efek berganda yang menguntungkan pedagang, petani, dan pelaku usaha lain di Desa Anakoli.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Bapak Bertolemus Seso selaku Ketua BPD Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi 28 keluarga penerima di Desa Anakoli memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan stabilisasi pendapatan rumah tangga, terutama dalam situasi pasca pandemi COVID-19. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, BLT menjadi instrumen penting sebagai jaring pengaman sosial yang mampu menjaga kestabilan ekonomi keluarga miskin. Melalui bantuan ini, beban rumah tangga akibat penurunan pendapatan dapat dikurangi, sehingga mereka tetap memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Selain itu, BLT Dana Desa juga berperan strategis dalam menekan angka kemiskinan sementara, dengan memberikan waktu dan ruang bagi penerima untuk bangkit secara ekonomi. Bantuan ini memungkinkan keluarga miskin tetap memperoleh akses terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar tanpa harus menjual aset produktif atau berutang. Dalam jangka pendek, hal ini menjaga keberlangsungan hidup mereka, sementara dalam jangka menengah, membantu mereka mempersiapkan strategi pemulihan ekonomi keluarga yang lebih mandiri.

Dampak lain yang ditimbulkan adanya efek berganda (multiplier effect) dari perputaran dana BLT di tingkat lokal. Uang yang diterima oleh keluarga penerima manfaat tidak hanya berhenti pada konsumsi pribadi, tetapi juga beredar kembali di dalam desa—membeli kebutuhan di warung tetangga, membeli hasil pertanian dari petani lokal, dan memanfaatkan jasa pelaku usaha setempat. Dengan demikian, BLT Dana Desa menjadi stimulus ekonomi desa yang turut menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di Desa Anakoli.

Wawancara dengan Bapak Serfasius Rudi selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 01 Desa Anakoli :

Bantuan BLT ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga secara langsung. Melalui BLT, saya dapat segera membeli kebutuhan dasar seperti beras,

minyak goreng, gula, dan bahan makanan lainnya tanpa harus menunggu kondisi ekonomi membaik secara keseluruhan baik yang ada di Desa Anakoli maupun di Pasar Danga yang ada di pusat Kabupaten Nagekeo. Bantuan ini sangat berarti, terutama di masa-masa sulit pasca pandemi, karena memberikan kepastian bagi keluarga untuk tetap dapat makan dan hidup layak meskipun pendapatan masih terbatas.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Bapak Serfasius Rudi selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 01 Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa Anakoli sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok secara langsung. Bagi banyak keluarga, bantuan ini menjadi solusi praktis dalam menghadapi tekanan ekonomi sehari-hari. Melalui BLT, masyarakat penerima BLT dapat membeli kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan makanan lainnya yang sangat dibutuhkan setiap hari. Tanpa harus menunggu kondisi ekonomi nasional atau daerah benar-benar pulih, BLT memberi ruang bagi kami untuk tetap menjalani kehidupan secara layak.

Keberadaan BLT juga meringankan beban psikologis keluarga miskin yang selama ini dibayang-bayangi kekhawatiran soal makan dan kebutuhan pokok lainnya. Terutama di masa pasca pandemi COVID-19, di mana harga kebutuhan pokok sering tidak stabil dan pendapatan rumah tangga belum kembali normal, BLT menjadi jaminan dasar agar dapur tetap bisa mengepul. Tidak hanya belanja di dalam Desa Anakoli, tetapi masyarakat juga bisa membeli barang kebutuhan dari Pasar Danga di pusat Kabupaten Nagekeo, yang selama ini menjadi rujukan utama masyarakat desa untuk belanja kebutuhan harian dengan harga bersaing.

Secara keseluruhan, BLT memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun jumlahnya tidak besar, manfaatnya sangat terasa karena tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat kecil yang sedang berjuang memulihkan diri dari dampak krisis. BLT menjadi bentuk kepedulian konkret yang memberikan harapan dan memperkuat ketahanan keluarga miskin di tengah situasi ekonomi yang belum menentu.

Wawancara dengan Bapak Hilarius Gebo selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 06 Desa Anakoli :

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi keluarga saya, khususnya dalam membuka peluang usaha. Dana BLT yang diterima, dimanfaatkan oleh saya sebagai modal awal untuk membuka kios sembako. Usaha kecil ini tidak hanya membantu menciptakan sumber pendapatan baru bagi keluarga, tetapi juga turut mendukung kebutuhan masyarakat sekitar akan bahan pokok. BLT bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan juga berperan sebagai pendorong kemandirian ekonomi warga desa Anakoli.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Bapak Hilarius Gebo selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 06 Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah memberikan dampak positif yang nyata bagi pemulihan

ekonomi keluarga masyarakat penerima BLT, terutama dalam hal menciptakan peluang usaha. Setelah menerima BLT, masyarakat memanfaatkannya sebagai modal awal membuka kios sembako kecil di rumah. Meskipun sederhana, langkah ini menjadi titik awal bagi masyarakat penerima BLT untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan mandiri. Dengan memulai usaha dari dana bantuan, masyarakat penerima BLT tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah semata, tetapi juga berusaha untuk bangkit secara ekonomi.

Kehadiran kios sembako ini tidak hanya bermanfaat bagi keluarga masyarakat penerima BLT sebagai sumber pendapatan tambahan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat sekitar terhadap bahan pokok. Warga desa tidak perlu lagi berjalan jauh untuk membeli beras, minyak goreng, gula, atau kebutuhan harian lainnya, karena semua tersedia di kios saya. Secara tidak langsung, usaha ini juga ikut menggerakkan ekonomi lokal dan mempererat hubungan sosial antartetangga dalam aktivitas jual beli sehari-hari.

Lebih dari sekadar bantuan konsumtif, BLT berfungsi sebagai pendorong awal bagi kemandirian ekonomi keluarga miskin di Desa Anakoli. Bantuan yang dikelola dengan baik dapat menjadi fondasi bagi lahirnya wirausaha baru di desa. Pengalaman ini menunjukkan bahwa BLT bukan hanya menyelamatkan dari kesulitan sesaat, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Jika ditopang dengan pendampingan dan pelatihan usaha, bantuan seperti BLT dapat menjelma menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi masyarakat desa.

Wawancara dengan Ibu Maria Goreti Muke selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 04 Desa Anakoli :

BLT sangat membantu sebagai fondasi menuju kemandirian ekonomi. Bantuan tersebut memberikan waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan strategi pemulihan ekonomi secara mandiri, tanpa harus terus bergantung pada bantuan. Ia merencanakan penggunaan dana BLT untuk investasi kecil, seperti membuka usaha sembako, serta melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui layanan pangkas rambut dan tambal ban. BLT bukan hanya solusi sementara, tetapi juga titik awal menuju penguatan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Ibu Maria Goreti Muke selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 04 Desa Anakoli dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat berarti bagi masyarakat penerima BLT karena berperan sebagai fondasi awal menuju kemandirian ekonomi. Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, BLT memberikan ruang dan waktu yang sangat dibutuhkan untuk bangkit dan merancang langkah pemulihan ekonomi secara perlahan namun pasti. Bantuan ini menjadi penopang dasar yang meringankan beban kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat penerima BLT bisa mulai berpikir lebih jauh tentang bagaimana membangun sumber pendapatan jangka panjang, bukan sekadar bertahan dari hari ke hari.

Dengan memanfaatkan BLT secara produktif, masyarakat penerima BLT merencanakan untuk berinvestasi dalam usaha kecil-kecilan seperti membuka kios sembako di rumah. Selain itu, masyarakat penerima BLT juga berupaya melakukan

diversifikasi sumber pendapatan melalui layanan jasa seperti pangkas rambut dan tambal ban, yang memiliki potensi pasar di lingkungan sekitar. Langkah ini dilakukan oleh masyarakat penerima BLT sebagai strategi untuk tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, tetapi justru memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal awal menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

BLT bukan hanya solusi sementara untuk mengatasi krisis, tetapi juga dapat menjadi titik awal perubahan ekonomi keluarga jika dikelola dengan bijak. Bantuan ini memberikan harapan baru dan motivasi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, serta menumbuhkan semangat berwirausaha di kalangan masyarakat desa. Dengan pendampingan dan pengelolaan yang tepat, BLT bisa menjadi pemicu bagi tumbuhnya ekonomi keluarga yang kuat dan mandiri di Desa Anakoli.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh kesimpulan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae memainkan peran strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi lokal pasca pandemi. Bantuan ini tidak hanya meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga penerima, tetapi juga mendorong perputaran uang di dalam desa. Lebih dari itu, BLT berfungsi sebagai stimulan ekonomi produktif dengan memperkuat usaha mikro dan menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi. Sinergi antara BLT dan pendampingan kelembagaan berpotensi mempercepat pemulihan ekonomi desa secara berkelanjutan.

2. Transparansi

Prinsip keterbukaan dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Anakoli. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pendataan calon penerima, hingga distribusi bantuan, dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa. Partisipasi aktif warga dalam proses ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang diabaikan dan semua berjalan sesuai prosedur yang disepakati bersama.

Melalui pendekatan partisipatif tersebut, bantuan tersalurkan secara lebih adil dan tepat sasaran. Mekanisme verifikasi dan validasi data dilakukan secara terbuka, sehingga warga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap daftar penerima. Proses ini mencegah terjadinya penyimpangan, memperkuat kontrol sosial, dan menjamin bahwa bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang terdampak berat akibat pandemi.

Lebih dari itu, transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BLT Dana Desa turut membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan menciptakan tata kelola bantuan sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga, terutama kelompok paling rentan. Dengan demikian, pengelolaan BLT tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Wawancara dengan Bapak Yoseph Laka Rani selaku Kepala Desa Anakoli:

Prinsip keterbukaan dan keterlibatan menjadi dasar utama dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sebanyak 28 penerima bantuan di Desa Anakoli telah melalui proses pendataan yang transparan dan partisipatif, dimulai dari tingkat RT/RW. Pendataan ini mengacu pada kriteria yang jelas, seperti warga yang tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, atau pemilik Kartu Pra Kerja, kehilangan mata pencaharian, tidak memiliki cadangan ekonomi yang memadai untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan, serta memiliki anggota keluarga dengan kondisi sakit menahun atau kronis. Proses ini, dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Bapak Yoseph Laka Rani selaku Kepala Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi utama dalam pengelolaan serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Anakoli. Pemerintah desa melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kepala RT/RW, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa, dalam setiap tahap pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Proses ini dirancang untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak, tanpa ada unsur pilih kasih atau intervensi pihak luar.

Sebanyak 28 penerima bantuan di Desa Anakoli ditetapkan melalui mekanisme pendataan yang transparan dan partisipatif, mengacu pada kriteria yang jelas. Di antaranya adalah warga miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, atau Kartu Pra Kerja. Selain itu, prioritas diberikan kepada keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat krisis ekonomi, tidak memiliki cadangan ekonomi untuk bertahan hidup selama minimal tiga bulan ke depan, serta yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi sakit menahun atau kronis. Pendekatan ini tidak hanya objektif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi secara menyeluruh.

Sistem pendataan yang terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif, proses penyaluran BLT menjadi lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga. Keterlibatan warga menciptakan rasa memiliki dan mengurangi potensi konflik sosial di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan seperti BLT tidak hanya soal pemberian uang tunai, tetapi juga soal membangun tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat desa, khususnya yang paling rentan.

Wawancara dengan Bapak Bertolemus Seso selaku Ketua BPD Desa Anakoli:

Prinsip keterbukaan dan keterlibatan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Anakoli. Seluruh proses penyaluran BLT kepada 28 penerima dilakukan secara transparan, dengan didukung oleh dokumentasi lengkap seperti berita acara, daftar hadir, dan bukti tanda terima yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat kapan pun diperlukan. Selain itu, penyaluran bantuan ini diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, guna memastikan bahwa bantuan benar-benar

sampai kepada yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Bapak Bertolemus Seso selaku Ketua BPD Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan dan keterlibatan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Anakoli. Pemerintah desa memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan kepada 28 penerima, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan serta mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan komitmen ini, masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki kontrol terhadap kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan mereka.

Setiap tahapan penyaluran BLT didukung oleh dokumentasi lengkap seperti berita acara musyawarah desa, daftar hadir penerima bantuan, hingga bukti tanda terima yang ditandatangani oleh penerima. Seluruh dokumen tersebut disimpan dan dapat diakses oleh masyarakat kapan pun dibutuhkan, baik untuk keperluan pelaporan, pengawasan, maupun evaluasi. Praktik ini mencerminkan semangat transparansi yang kuat dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat bisa memastikan bahwa bantuan digunakan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran.

Proses penyaluran BLT di Desa Anakoli diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif. Kehadiran mereka dalam pengawasan memberikan jaminan bahwa bantuan tidak hanya disalurkan sesuai prosedur, tetapi juga diterima oleh warga yang benar-benar berhak. Pengawasan partisipatif ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam program bantuan sosial.

Wawancara dengan Bapak Serfasius Rudi selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 01 Desa Anakoli :

Prinsip keterbukaan dan keterlibatan dalam penyaluran bantuan BLT sangat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai penerima, saya mengetahui dengan jelas informasi mengenai mekanisme penyaluran BLT, termasuk jadwal, tempat, dan bentuk bantuan yang diterima langsung di Kantor Desa Anakoli. Dana yang saya terima sesuai dengan jumlah yang telah, yakni Rp600.000 per bulan selama tiga bulan pertama, dan Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya, tanpa ada potongan sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Bapak Serfasius Rudi selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 01 Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan dan keterlibatan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sejak awal, informasi mengenai mekanisme penyaluran BLT disampaikan secara terbuka oleh pemerintah desa, baik melalui pengumuman langsung maupun lewat pertemuan warga. Masyarakat mengetahui dengan jelas kapan jadwal pencairan bantuan, di mana tempat penyaluran dilakukan yaitu di Kantor Desa Anakoli serta bentuk dan jumlah bantuan yang akan diterima.

Selama proses penyaluran, tidak ada unsur yang ditutup-tutupi. Dana yang saya terima sesuai dengan ketentuan, yakni sebesar Rp600.000 per bulan untuk tiga bulan pertama, dan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan berikutnya. Bantuan tersebut masyarakat terima secara utuh, tanpa ada potongan atau pungutan dalam bentuk apa pun. Hal ini memperlihatkan bahwa aparat desa menjalankan penyaluran bantuan dengan jujur dan profesional, serta menjunjung tinggi kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

Keterbukaan ini juga menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan di kalangan warga penerima bantuan. Masyarakat merasa dilibatkan secara penuh, tidak hanya sebagai penerima pasif tetapi juga sebagai bagian dari proses pengawasan sosial. Dengan adanya transparansi dalam setiap tahapan, dari perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat dapat memastikan bahwa BLT benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya, yakni membantu keluarga miskin bertahan di masa sulit, sekaligus menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

Wawancara dengan Bapak Hilarius Gebo selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 06 Desa Anakoli:

Prinsip keterbukaan dan keterlibatan sangat terasa dalam proses pengelolaan dan penyaluran bantuan tunai di desa Anakoli. Seluruh mekanisme, kriteria, serta jadwal penyaluran disampaikan secara terbuka kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saya selaku penerima BLT, merasa layak menerima BLT karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yakni tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, atau Kartu Pra Kerja, mengalami kehilangan mata pencaharian, tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan, serta memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun atau kronis. Keterbukaan ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dan dipercaya dalam proses yang berjalan.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Bapak Hilarius Gebo selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 06 Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan dan keterlibatan sangat terasa dalam proses pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Anakoli. Sejak awal, seluruh mekanisme, kriteria penerima, hingga jadwal penyaluran bantuan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui pertemuan warga dan pengumuman di tempat-tempat umum. Pemerintah desa juga melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat RT/RW dalam proses verifikasi dan validasi data, sehingga tidak ada informasi yang ditutupi. Hal ini menciptakan suasana transparansi dan akuntabilitas yang membuat masyarakat merasa tenang dan percaya terhadap proses yang berjalan.

Masyarakat sebagai penerima BLT adalah penerima yang sudah memenuhi kriteria, dimana tidak pernah menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, atau Kartu Pra Kerja. Selain itu, masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, Masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis, sehingga beban pengeluaran semakin besar. Dengan

keterbukaan informasi dan proses yang jelas, saya merasa penerimaan bantuan ini adil dan berdasarkan kebutuhan riil.

Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam mengawal pelaksanaan program sosial di desa. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dipercaya, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa pun meningkat. Ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dan keterlibatan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang adil, transparan, dan berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Wawancara dengan Ibu Maria Goreti Muke selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 04 Desa Anakoli :

Prinsip keterbukaan dan keterlibatan sangat dirasakan dalam proses penyaluran BLT di Desa Anakoli. Ia Saya mengetahui secara jelas alasan mengapa terpilih sebagai penerima BLT, yakni setelah melalui proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa sejak dari tingkat RT/RW. Saya ditetapkan sebagai penerima didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga, di mana pendapatan bulanan saya berada di bawah satu juta rupiah, dengan tanggungan lima orang anak, dimana anak tertua masih duduk di bangku SMA dan kondisi sebagai ibu rumah tangga yang telah kehilangan suami.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Ibu Maria Goreti Muke selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 04 Desa Anakoli dapat dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan dan keterlibatan sangat dirasakan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Anakoli. Sejak awal, pemerintah desa menyampaikan secara terbuka tahapan-tahapan penyaluran, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan. Proses ini melibatkan aparat RT/RW serta tokoh masyarakat, sehingga setiap warga bisa mengetahui dasar dan alasan penetapan penerima BLT.

Pendapatannya sebagai ibu rumah tangga berada di bawah satu juta rupiah per bulan, sementara saya harus menanggung beban hidup lima orang anak. Anak tertua saya masih duduk di bangku SMA dan memerlukan biaya pendidikan, sementara saya juga telah kehilangan suami yang sebelumnya menjadi tulang punggung keluarga. Situasi ini membuat saya masuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa, yakni keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki cadangan ekonomi yang memadai.

Dengan proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat, saya merasa bahwa bantuan yang saya terima bukan karena belas kasihan, tetapi karena hak saya sebagai warga yang memenuhi syarat. Keterbukaan ini juga membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa dan mengurangi potensi kecemburuan sosial. Masyarakat dapat melihat bahwa proses penyaluran BLT benar-benar dilakukan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga bantuan yang ada benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh kesimpulan bahwa prinsip keterbukaan dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan dan

penyaluran BLT Dana Desa di Desa Anakoli. Melalui proses transparan dan partisipatif, mulai dari pendataan hingga pengawasan, bantuan tersalurkan secara adil dan tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan tata kelola bantuan sosial yang akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga yang paling rentan.

B. Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan

Dalam menganalisis aspek Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang positif dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

PKH dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang. Dengan memberikan bantuan yang bersyarat, penerima manfaat diharuskan untuk memenuhi sejumlah kewajiban yang mendukung peningkatan kualitas hidup, seperti menyekolahkan anak-anak, membawa ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan, serta memperhatikan gizi keluarga. Tujuan ini sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.

Secara praktis, program ini membantu masyarakat miskin untuk:

- 1) Meningkatkan Akses terhadap Layanan Dasar Seperti pendidikan bagi anak-anak dan layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
- 2) Mengurangi Beban Ekonomi Rumah Tangga Dengan bantuan tunai berkala, keluarga penerima manfaat dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka, seperti pembelian makanan bergizi, biaya transportasi sekolah, dan kebutuhan kesehatan.
- 3) Mendorong Perubahan Perilaku Positif PKH menciptakan kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama dalam keluar dari lingkaran kemiskinan.
- 4) Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Penerima PKH diarahkan untuk menjadi lebih mandiri melalui penguatan peran sosial dan integrasi.berupa indikator Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Transparansi

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Wawancara dengan Bapak Hilarius Betu selaku KABID Perlindungan Sosial:

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wolowae, Desa Anakoli, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan sosial bersyarat. Program ini mencakup bantuan untuk pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Bapak Hilarius menekankan pentingnya pendamping PKH yang bekerja dengan ikhlas dan proaktif dalam mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM), sesuai dengan arahan Menteri Sosial Tri

Rismaharini yang mengingatkan pendamping untuk bekerja dengan hati nurani demi kesejahteraan warga.

Wawancara dengan Bapak Karolus Geri Selaku pendamping PKH di Desa Anakoli:

Peran utama pendamping adalah memastikan bantuan dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Ia juga aktif mendampingi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal edukasi pengelolaan keuangan, peningkatan kesadaran pendidikan dan kesehatan, serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Menurut beliau, sejak adanya PKH, masyarakat mulai menunjukkan perubahan positif, seperti meningkatnya kehadiran anak-anak di sekolah dan partisipasi ibu-ibu dalam pelayanan posyandu. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program dan kendala teknis dalam penyaluran bantuan. Namun, tantangan tersebut diatasi dengan pendekatan persuasif dan kerja sama lintas pihak. Ia berharap ke depan, PKH tidak hanya menjadi bantuan bersifat konsumtif, tetapi juga mampu membuka peluang pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan

Wawancara dengan Bapak Valentinus Lengi selaku Masyarakat Penerima PKH di RT 03 Desa Anakoli :

Program ini sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dan biaya kesehatan. Ia mengaku bahwa sebelum menerima bantuan, seringkali kesulitan membeli perlengkapan sekolah atau membawa anak ke puskesmas saat sakit. Namun sejak mendapatkan PKH, ia merasa lebih tenang dan mampu memprioritaskan kebutuhan penting keluarga. Menurutnya, bantuan ini bukan hanya sekadar dana, tetapi juga motivasi untuk lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Ia berharap program PKH dapat terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan, agar lebih banyak keluarga di desanya dapat merasakan manfaat yang sama, serta mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan sejahtera di masa depan. Wawancara dengan Ibu Bernadetha Ena selaku Masyarakat Penerima PKH di RT 05 Desa Anakoli:

Bantuan yang diterimanya sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga, terutama untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak. Ia mengatakan bahwa sebelum mendapatkan bantuan, ia sering merasa kesulitan membeli perlengkapan sekolah dan membawa anak ke layanan kesehatan karena keterbatasan biaya. Dengan adanya PKH, beban tersebut sedikit berkurang, dan ia merasa lebih termotivasi untuk memperhatikan perkembangan anak-anaknya, baik di sekolah maupun dalam hal kesehatan. Ia juga merasa terbantu dengan adanya pendampingan dan informasi dari pendamping PKH yang mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam penggunaan bantuan. Ibu Bernadetha berharap program ini terus dilanjutkan dan dikembangkan, karena sangat membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan kesejahteraan dan membangun kehidupan keluarga yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program Keluarga

Harapan (PKH) di Desa Anakoli memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan sosial bersyarat ini tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga penerima, tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih memperhatikan perkembangan anak-anak dan aspek kesehatan keluarga. Peran pendamping PKH sangat krusial dalam memastikan bantuan tepat sasaran serta memberikan edukasi dan pendampingan yang efektif kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kendala teknis, pendekatan yang persuasif dan kerja sama antar pihak terkait mampu mengatasinya. Para penerima manfaat berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, PKH berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga miskin di Desa Anakoli.

2. Transparansi

Wawancara dengan Bapak Yoseph Laka Rani selaku Kepala Desa Anakoli:

transparansi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan pendamping PKH dan perangkat RT/RW dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat, serta secara terbuka menyampaikan informasi terkait jumlah penerima dan nominal bantuan dalam setiap pertemuan atau musyawarah desa. Menurutnya, keterbukaan ini bukan hanya untuk menghindari kecurigaan atau kecemburuan sosial, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Ia berharap ke depan, sistem pelaporan dan evaluasi PKH semakin diperkuat agar program ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendorong kemandirian dan kesejahteraan keluarga penerima dalam jangka panjang.

Wawancara dengan Bapak Bertolemus Sesu selaku Ketua BPD Desa Anakoli:

Transparansi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian penting dari upaya menjaga keadilan sosial di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa BPD memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa proses pendataan, penetapan, dan penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, termasuk melalui forum musyawarah desa, sangat membantu menghindari kesalahpahaman atau dugaan adanya pilih kasih. Bapak Bertolemus juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan BPD dalam menjaga keterbukaan informasi, sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa saja penerima bantuan dan alasan mereka layak menerima. Ia berharap ke depan sistem ini terus diperkuat agar program PKH tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga benar-benar menjadi sarana peningkatan kesejahteraan yang transparan dan terpercaya bagi masyarakat Desa Anakoli

Wawancara dengan Bapak Damasus Uku selaku Masyarakat Penerima PKH di RT 03 Desa Anakoli:

Sejauh ini proses penyaluran bantuan PKH di desanya cukup terbuka, mulai dari pengumuman daftar penerima, nominal bantuan, hingga waktu penyaluran yang disampaikan secara jelas oleh pendamping dan aparat desa. Menurutnya, hal ini sangat penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta menghindari rasa curiga atau kecemburuan sosial. Ia juga mengapresiasi adanya musyawarah desa dan penyampaian informasi secara langsung, karena masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan atau keluhan jika ada hal-hal yang dianggap kurang jelas. Bagi beliau, transparansi bukan hanya soal keterbukaan data, tetapi juga soal kejujuran dan rasa keadilan dalam penerapan program, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi keluarga penerima.

Wawancara dengan Ibu Bernadetha Ena selaku Masyarakat Penerima PKH di RT 05 Desa Anakoli:

Transparansi dalam program PKH sangat penting bagi masyarakat, terutama agar bantuan dapat diterima secara adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ia menyampaikan bahwa selama ini informasi terkait jumlah bantuan, waktu pencairan, dan siapa saja penerima selalu disampaikan secara terbuka oleh pendamping PKH maupun aparat desa melalui pertemuan-pertemuan warga. Menurutnya, keterbukaan tersebut membuat masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan, serta mencegah munculnya prasangka negatif. Ibu Bernadetha juga mengatakan bahwa dengan adanya transparansi, ia merasa lebih percaya dan tenang, karena bantuan diterima sesuai prosedur dan digunakan sebagaimana mestinya. Ia berharap ke depan transparansi ini tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan agar program PKH dapat terus berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Wawancara dengan Bapak Valentinus Lengi selaku Masyarakat Penerima BLT di RT 06 Desa Anakoli:

Transparansi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desanya. Meskipun dirinya merupakan penerima BLT, ia memperhatikan bagaimana proses PKH berjalan di masyarakat dan menilai bahwa selama ini program tersebut sudah cukup transparan. Informasi mengenai daftar penerima, besaran bantuan, serta waktu pencairan disampaikan secara terbuka melalui pengumuman di balai desa maupun pertemuan warga. Menurutnya, transparansi ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman antarwarga dan memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara adil kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia berharap ke depan, keterbukaan informasi dalam program-program bantuan seperti PKH dan BLT terus dijaga, agar masyarakat semakin percaya pada sistem dan termotivasi untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Anakoli, baik dari perspektif pemerintah desa, lembaga pengawas, maupun masyarakat

penerima manfaat. Kepala Desa Anakoli, Bapak Yoseph Laka Rani, menekankan bahwa keterbukaan informasi terkait penerima, nominal bantuan, dan proses penyaluran dijaga melalui koordinasi yang baik dengan pendamping PKH dan perangkat desa. Hal ini juga didukung oleh Ketua BPD, Bapak Bertolemus Seso, yang menegaskan bahwa pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa menjadi langkah strategis untuk mencegah kecemburuan sosial dan menjamin keadilan. Dari sisi penerima, seperti Bapak Damasus Uku dan Ibu Bernadetha Ena, transparansi dirasakan langsung melalui pengumuman terbuka, pertemuan warga, dan komunikasi aktif dengan pendamping. Keduanya sepakat bahwa transparansi meningkatkan rasa kepercayaan, keadilan, dan kepuasan terhadap program. Bahkan Bapak Valentinus Lengi, meskipun bukan penerima PKH, mengamati bahwa proses dalam program tersebut cukup terbuka dan menjadi contoh pelaksanaan bantuan sosial yang layak dipercaya. Secara keseluruhan, keterbukaan informasi dalam program PKH tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, dapat disimpulkan bahwa implementasi kedua program ini telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan. BLT berperan dalam memberikan bantuan tunai langsung yang membantu pemulihan ekonomi masyarakat di tengah kesulitan ekonomi, sementara PKH telah mendorong akses keluarga penerima manfaat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta transparansi dalam proses penyaluran bantuan yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Saran

1. Saran untuk Pemerintah Desa Anakoli
 - Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis terkait manajemen program bantuan sosial.
 - Memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan.
 - Menyusun perencanaan strategis jangka panjang yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Saran untuk Masyarakat Desa Anakoli
 - Meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
 - Memanfaatkan bantuan yang diterima sebagai modal awal untuk kegiatan produktif, bukan hanya sebagai konsumsi sesaat.
 - Berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyimpangan dalam

pelaksanaan program.

3. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

- Memberikan pendampingan khusus kepada desa-desa tertinggal, termasuk Desa Anakoli, dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
- Menambah alokasi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pengembangan UMKM dan pelatihan keterampilan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PKH dan BLT untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat.

4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

- Melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dampak jangka panjang program PKH dan BLT terhadap perubahan perilaku ekonomi masyarakat.
- Memperluas objek penelitian di desa-desa lain di Kabupaten Nagekeo untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan bantuan sosial di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1975). *Public policy making: An introduction*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Asikin, Z. (2014). *Kebijakan pembangunan desa: Teori dan implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Bappenas. (2015). *Pembangunan desa dan kebijakan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hidayat, R. (2018). Efektivitas kebijakan pembangunan desa dalam menurunkan kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 7(3), 88–102.
- Lasswell, H. D. (1956). *The decision process: Seven categories of functional analysis*.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through". *Public Administration Review*, 19(2), 79–88.
- Mardiana, L., & Fitri, M. (2020). Peran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 12(1), 31–47.
- Nugroho, A., & Santoso, W. (2022). Tantangan dalam implementasi kebijakan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 112–125.
- Paryono, A. (2016). *Desa dalam perspektif pembangunan dan kebijakan pemerintahan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Suharyo, H. (2017). *Membangun desa berbasis partisipasi masyarakat*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Susanto, P., & Yuniarti, E. (2021). Keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 25–40.
- Suyatno, A. (2019). Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat desa. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(2), 45–59.